



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, diperlukan Pedoman dalam penyelenggaraan data gender dan anak bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan instansi vertikal dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

2. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
3. Data adalah sejumlah informasi berupa keterangan, gambaran atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk katagori, huruf, atau bilangan yang diperoleh melalui observasi (pengamatan) terhadap sekumpulan individu.
4. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan/atau sudah dipublikasikan.
5. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
6. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 tahun yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
7. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambil keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
8. Data kekerasan adalah jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan P2TPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak), dan PKT (Pusat Krisis Terpadu) di Puskesmas dan Rumah sakit, UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) di Kepolisian dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Women Crisis Center (WCC) Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya sebagai jejaring Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA).
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.

16. Instansi terkait adalah meliputi instansi vertikal Pemerintah Pusat di daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai rujukan bagi SKPD dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data gender dan anak secara terpadu, sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah;
- c. mengatur hubungan kerja antar penyelenggara data gender dan anak di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- d. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait dalam penggunaan data gender dan anak; dan
- e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan data gender dan hak anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan data gender dan anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. dapat diukur;
- d. relevan; dan
- e. berkelanjutan.

BAB II

PENGELOLAAN DATA

Pasal 4

- (1) SKPD dan instansi terkait harus melakukan pengelolaan data gender dan anak yang meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. analisis; dan
 - d. penyajian.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua jenis data terpilah gender dan anak.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan metodologi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) SKPD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib menyelenggarakan data gender dan anak dengan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan dan penyajian data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Forum Data Gender dan Anak.
- (2) Keanggotaan Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD dan instansi terkait.
- (3) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh:
 - a. Gubernur untuk tingkat Provinsi; dan
 - b. Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Forum Data Gender dan Anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
 - b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat provinsi;
 - d. menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SKPD masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak.
- (5) Forum Data Gender dan Anak dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di SKPD Provinsi yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (6) Sekretariat Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. sarana komunikasi dan media dialog antar anggota Forum Data Gender dan Anak guna menghindari duplikasi data;
 - b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing SKPD.

Pasal 7

- (1) Data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi bahan rekapitulasi data oleh SKPD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap semester kedua tahun berjalan dan didistribusikan kepada SKPD dan instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Rincian lebih lanjut pedoman berupa jenis data gender dan anak, dan format data terpilah gender dan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis data gender dan anak, dan format data terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data gender dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

SKPD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.

Pasal 11

Bupati dan Walikota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Data Gender dan Anak di daerahnya kepada Gubernur setiap semester pertama tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

SKPD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi/Kabupaten/Kota harus melaksanakan penyelenggaraan Data Gender dan Anak berdasarkan Peraturan Gubernur ini secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 September 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu lintas sektor yang menuntut kerjasama berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena sifatnya yang luas dan saling berkait antar berbagai bidang. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak hanya terfokus pada bidang sosial tetapi juga meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, budaya dan lingkungan. Berkaitan dengan luasnya isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sifatnya yang melibatkan berbagai bidang kerja maka perlu strategi untuk mengintegrasikan isu tersebut dalam pembangunan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional merupakan salah satu strategi mengintegrasikan isu gender dalam pembangunan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan melalui pembangunan. Implementasi dari pengarusutamaan gender dalam pembangunan mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang membutuhkan adanya analisis kondisi gender di lapangan sebagai sasaran pembangunan. Di sisi lain pemenuhan hak-hak anak juga menjadi salah satu kunci penting yang kemudian diintegrasikan dalam pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan yang menuntut pula ketersediaan informasi tentang kondisi anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Integrasi gender dan anak dalam pembangunan ini menuntut tersedianya informasi dan data tentang kondisi gender dan anak yang akurat sehingga semua aspek pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dapat berjalan dengan tepat sesuai dengan kondisi gender dan anak. Untuk itu data terpilah Gender dan Anak yang memberi gambaran kondisi gender dan anak dalam proses pembangunan tersebut menjadi salah satu hal penting sebagai syarat pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

Penyelenggaraan data terpilah gender dan anak adalah urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejalan dengan maksud tersebut, perlu diatur penyelenggaraan data gender dan anak dalam bentuk pedoman penyelenggaraan data gender dan Anak dalam penyelenggaraan data di Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "spesifik" adalah data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dapat dipercaya" adalah dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat diukur" adalah dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "relevan" adalah data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengolahan data” adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “analisis data” adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variable yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyajian data” adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012
NOMOR 53

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DATA GENDER DAN ANAK

JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

A. DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

I. Data Umum

1.1. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam hal ini digunakan konsep dari BPS yaitu bahwa pencacahan penduduk menggunakan konsep “*de jure*” atau konsep *dimana seseorang biasanya menetap/ bertempat tinggal*” (*usual residence*) dan konsep “*de facto*” atau konsep *dimana seseorang berada pada saat pencacahan*”.

Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.

Sumber data : Badan Pusat statistik, sensus Penduduk atau Proyeksi Sensus Penduduk

1.2. Jumlah Kepala Rumah Tangga

Konsep yang dipakai berdasarkan definisi BPS yaitu *Rumah Tangga*. *Rumah tangga biasa* adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Sumber data : Badan Pusat statistik, sensus Penduduk atau Survei

1.3. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur

Merupakan Jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan Usia. Usia dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.

Sumber data : Badan Pusat statistik, sensus Penduduk

1.4. **IPM, IPG dan IDG**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Ketiga dimensi dasar tersebut adalah lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa (bobot 2/3) dan rata-rata lama sekolah (bobot 1/3) dan standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (*Purchasing Power Parity/PPP* Rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0 – 100.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender. Nilai indeks berkisar 0 – 100.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG dihitung dari persentase perempuan di parlemen diantara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer dan diantara pekerja profesional dan teknisi. Nilai indeks berkisar 0 – 100.

Sumber data : Badan Pusat statistik/Kementerian PP dan PA

II. Data Bidang Kesehatan

2.1. **Angka harapan hidup**

Angka harapan hidup perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur.

Sumber data : Badan Pusat statistik/Kementerian PP dan PA

2.2. **Jumlah dan Usia Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas**

Jumlah kasus kematian ibu yaitu jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, melahirkan dan masa nifas.

Sumber data : Dinkes Provinsi

2.3. **Penyebab kematian ibu Karena hamil, Melahirkan dan Nifas**

Merupakan jumlah kematian ibu hamil, melahirkan, dan masa nifas yang dikategorisasikan berdasarkan penyebab utama kematiannya.

Sumber data : Dinkes Provinsi

2.4. **Kelahiran Berdasarkan Penolong Persalinan**

Merupakan banyaknya jumlah kelahiran dan prosentase Penolong persalinan. Sumber data : Dinkes Provinsi

2.5. Cakupan Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan

Dalam indikator ini ada dua macam indikator kunjungan yaitu K1 dan K4.

Cakupan kunjungan ibu hamil K1 yaitu: Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang pertama kali pada masa kehamilan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 yaitu: Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Sumber data : Dinkes Provinsi

2.6. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil

Imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil merupakan pemberian imunisasi TT pada seluruh Ibu Hamil sesuai dosis yang dibutuhkan. Diharapkan seluruh Wanita Usia Subur (15-39 th) sudah mendapatkan 5 dosis TT yang dimulai sejak bayi, anak sekolah dasar, calon temanten dan ibu hamil.

Sumber data : Dinkes Provinsi

2.7. Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)

Ibu hamil yang mendapat tablet Fe1 yaitu Ibu hamil yang mendapat 30 tablet Fe (suplemen zat besi) selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan Ibu hamil yang mendapat tablet Fe3 yaitu Ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe (suplemen zat besi) selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Sumber data : Dinkes Provinsi

2.8. Jumlah Ibu hamil yang beresiko

Ibu hamil beresiko tinggi (RISTI) adalah Keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi, meliputi: (Hb < 8 g%, tekanan darah tinggi (sistole > 140 mmHg, diastole > 90 mmHg, oedema nyata, eklampsia, perdarahan pervaginam, ketuban pecah dini, letak lintang pada usia kehamilan >32 minggu, letak sungsang pada primigravida, infeksi berat/sepsis, persalinan prematur. Sedangkan Ibu hamil KEK adalah jumlah ibu hamil yang menderita kekurangan energi kalori

Sumber data : Dinkes Provinsi

7.2. Penderita HIV/AIDS

Data ini merupakan data Penderita HIV/AIDS yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah tercatat.

Sumber data : Dinkes Provinsi

2.10. Usia perkawinan

2.10.a. Jumlah Pernikahan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Sumber data : Kanwil Kemenag Provinsi DIY

2.10.b. Persentase perempuan menurut usia perkawinan pertama

Sumber data : BPS Prov. DIY

2.11. Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Merupakan jumlah Akseptor KB yang dipilah berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Alat Kontrasepsi yang digunakan yang terdata di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY.

Sumber data : BKKBN Prov. DIY

2.12. Unmet Need

Definisi *unmet need* dalam data ini adalah proporsi pasangan usia subur yang menikah yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak menggunakan alat atau cara kontrasepsi.

Sumber data : BKKBN Prov. DIY

2.13. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Sumber data : Badan Narkotika Daerah

III. Data Bidang Pendidikan

3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah murid di jenjang pendidikan tertentu, berapapun umurnya terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Kegunaan APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi

3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah presentase anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi

- 3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA
Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase murid dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di umur yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.
 Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi
- 3.4. Angka Melek Huruf (AMH) menurut kelompok umur.
Angka Melek Huruf Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.
 Sumber data : BPS / Kemen PP & PA
- 3.5. Jumlah Siswa Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan
 Angka putus sekolah (APTS) menunjukkan tingkatan putus sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang tersebut.
 Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi
- 3.6. Persentase Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan
 Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT) adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan terhadap jumlah penduduk. TPT bermanfaat untuk menunjukkan tingkat kualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah. TPT juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja disuatu wilayah.
 Sumber data : BPS
- 3.7. Rata-rata lama sekolah
Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang di habiskan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.
 Sumber data : BPS / Kemen PP & PA
- 3.8. Jumlah Guru (negeri/swasta)
 Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi
- 3.9. Sertifikasi guru (negeri/swasta)
 Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi

- 3.10. Jumlah Peserta Kejar Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional (KF)
Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi
- 3.11. Jumlah Kelulusan Paket A,B dan C
Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi
- 3.12. Jumlah Penerima Beasiswa tingkat SLTP dan SLTA
Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi
- 3.13. Jumlah Siswa berprestasi
 - 3.13.a. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Akademik
 - 3.13.b. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Seni
 - 3.13.c. Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Olah Raga
 Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi

IV. Data Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 4.1. Gerakan Masyarakat peduli lingkungan
- 4.2. Dampak bencana lingkungan terhadap gender dan anak

V. Data Bidang Ekonomi & Ketenagakerjaan

- 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Indikator ini merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. TPAK menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum mendapatkan pekerjaan.
Sumber Data: *BPS, SP, survei Angkatan Kerja Nasional(Sakernas)*
- 5.2. Jumlah Penduduk Miskin
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
Sumber Data: *BPS*
- 5.3. Tenaga Kerja Migran
Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe yaitu pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi (antar daerah) dan pekerja migran internasional (antar negara).
Sumber Data: *Dinas Tenaga Kerja Provinsi*
 - 5.3.a. Antar kerja antar daerah (AKAD)
 - 5.3.b. Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

- 5.4. Jumlah Pekerja di sektor formal
Yang digolongkan dengan bekerja di sektor formal dalam sakernas (menggunakan pendekatan status pekerjaan) adalah orang yang status kedudukan dalam pekerjaan adalah sebagai Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau sebagai buruh/karyawan/pegawai. Indikator ini berguna untuk melihat gambaran daya serap sektor formal terhadap penduduk.
Sumber Data: *BPS, survei Angkatan Kerja Nasional(Sakernas)*
- 5.5. Jumlah Pekerja di sektor informal
Sumber Data: *BPS, survei Angkatan Kerja Nasional(Sakernas)*
- 5.6. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Merupakan jumlah Usaha mikro dan Kecil (UMK) individu/perorangan yang terdaftar di Dinas Perindakop DIY
Sumber Data: *Disperindakop Provinsi*
- 5.7. Keanggotaan Koperasi
Anggota koperasi dalam data ini adalah anggota koperasi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Membayar simpanan pokok,
 - b. Membayar Simpanan Wajib
 - c. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan/dipersyaratkan sesuai dengan AD/ART
 - d. Telah menandatangani buku daftar anggota
- Sumber Data:** *Disperindakop Provinsi*
- 5.8. Jumlah Pengangguran
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau yang belum bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan, dan yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
Pengangguran terbuka yaitu jumlah penduduk yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima, bekerja tetapi belum mulai bekerja.
Sumber Data: *BPS,*
- 5.9. Pekerja Tidak Dibayar
Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.
Sumber Data: *BPS,*

- 5.10. Perempuan Pekerja Profesional dan manajerial
Indikator ini menunjukkan persentase penduduk perempuan usia 15+ yang bekerja sebagai tenaga profesional atau manajerial terhadap jumlah penduduk perempuan usia 15+ yang bekerja. Indikator ini berguna untuk melihat partisipasi pekerja perempuan yang berkerja di level manajer.

Sumber Data: BPS

- 5.11. Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, dan Jenis Pekerjaan

Sumber Data: BPS

5.11.1. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

5.11.2. Penduduk Bekerja Menurut status Pekerjaan

5.11.3. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

- Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha/ lembaga tempat responden bekerja.
- Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan dalam pekerjaan utama.
- Jenis Pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang atau ditugaskan kepada seseorang. Dengan menanyakan apa yang dilakukan oleh responden di tempat bekerjanya.

Status Pekerjaan dikelompokkan:

- **Berusaha Sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan.
- **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri dan memperkerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
- **Buruh/karyawan/pegawai** tetap dibayar adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.
- **Pekerja Bebas di pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumahtangga maupun bukan usaha rumahtangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

- **Pekerja Bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- **Pekerja tidak dibayar/pekerja** keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.

Lapangan pekerjaan/usaha dalam beberapa publikasi dikelompokkan menjadi AMS (pertanian, manufaktur, servis jasa).

Lapangan Pekerjaan dikelompokkan :

- **Lapangan Pekerjaan Jasa kemasyarakatan** adalah lapangan usaha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kegiatan ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan, Negara, keamanan dan keselamatan Negara. Katagori ini juga mencakup kegiatan jaminan social wajib. Lapangan usaha ini juga mencakup jasa perorangan/tenaga professional.
- **Industri Pengolahan** adalah suatu unit/ kesatuan produksi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk mengolah suatu barang secara mekanik, kimia, atau dengan tangan, sehingga menjadi benda/barang/ produk baru yang nilainya lebih tinggi, dan sifatnya lebih dekat dengan kepada konsumen akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industry dan pekerjaan perakitan.
- **Lapangan Pekerjaan Lainnya** adalah lapangan usaha /kegiatan lainnya, seperti kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan air bersih, real estat, jasa administrasi dan jasa penunjang, serta badan dan organisasi internasional.

VI. Data Bidang Politik dan Pengambil Keputusan

6.1. Perempuan di Eksekutif

Indikator ini menggambarkan kondisi peran gender pada jabatan di pemerintahan, seberapa banyak perempuan yang berada dalam jabatan di pemerintah yaitu sebagai Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Camat, dan kepala desa.

6.1.1. Jumlah Bupati/Walikota

6.1.2. Jumlah Camat

6.1.3. Jumlah Kepala Desa /Lurah

6.1.4. Jumlah Pejabat PNS Berdasarkan eselon

Indikator ini menggambarkan perbandingan jabatan pada eselon I s/d IV di dalam pemerintah antara laki-laki dan perempuan.

6.1.5. PNS Menurut Jenis Kelamin dan golongan

Menunjukkan jumlah PNS di lingkungan pemerintah provinsi DIY, dan pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan Golongan. Data banyaknya pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin, dapat digunakan untuk melihat proporsi PNS perempuan terhadap laki-laki. Besarnya proporsi PNS perempuan pada sektor ketenagakerjaan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pegawai negeri khususnya dan lapangan kerja secara umum.

6.1.6. Anggota Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

6.2. Perempuan di Legislatif

Indikator ini merupakan salah satu indikator untuk penghitungan indeks pemberdayaan Gender (IPG) yaitu indikator yang memfokuskan pada perempuan diparlemen di antara anggota legislatif, pegawai senior dan manajer serta diantara pekerja profesional dan teknisi yang berfungsi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

6.2.1. Jumlah anggota DPRD Menurut komisi,

6.2.2. Jumlah Caleg, dan Pengurus Harian Partai Politik

6.2.3. Pengurus dan Anggota kaukus Perempuan Politik

6.2.4. Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)

6.3. Perempuan di Lembaga Yudikatif

6.3.1. Jumlah Jaksa Menurut Jabatan

6.3.2. Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama

6.3.3. Jumlah Hakim dan Pejabat di Pengadilan Negeri

6.3.4. Jumlah Polisi

6.3.5. Jumlah Pejabat di Kepolisian

VII. Data Bidang Hukum dan Sosial Budaya

- 7.1 . Jumlah Penghuni Lapas
 - 7.1.1. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - 7.1.2. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Kelompok Umur
 - 7.1.3. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Kasus
 - 7.1.4. Jumlah dan Jenis Lapas
- 7.2. Jumlah Penghuni Rumah Tahanan (RUTAN)
- 7.3. Jumlah Penduduk Lansia
 - 7.3.1. Jumlah Penduduk Lansia menurut pendidikan yang ditamatkan
 - 7.3.2. Jumlah Penduduk Lansia menurut aktivitas yang dilakukan
- 7.4. Penyandang Disabilitas (Penda)
 - 7.4.1. Penyandang disabilitas menurut pendidikan yang ditamatkan
 - 7.4.2. Penyandang cacat menurut aktivitas yang dilakukan
- 7.5. Pengungsi akibat konflik/bencana
- 7.6. Jumlah kasus Perceraian menurut jenis kelamin pemohon

VIII. Data Kekerasan

- 8.1. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) Adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

 - 8.1.1. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Kelompok Umur.
 - 8.1.2. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Tingkat pendidikan.
 - 8.1.3. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut pekerjaan.
 - 8.1.4. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan
 - 8.1.5. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Jenis Kekerasan
 - 8.1.6. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat Kejadian
 - 8.1.7. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Jenis Layanan Yang diberikan
 - 8.1.8. Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut Frekuensi Kekerasan
 - 8.1.9. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kelamin, dan Usia.
 - 8.1.10. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan
 - 8.1.11. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan
 - 8.1.12. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Korban

- 8.1.13. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kebangsaan.
- 8.2. Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 8.2.1. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
 - 8.2.2. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Pendidikan
 - 8.2.3. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkawinan
 - 8.2.4. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Jenis Layanan yang Diberikan
 - 8.2.5. Jumlah Pelaku Perdagangan Orang Menurut Proses hukum Terhadap Pelaku
 - 8.2.6. Amar Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang .
 - 8.2.7. Gugus Tugas dan Kebijakan Terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan orang.

IX. Data Anak

- 9.1. Kekerasan Terhadap Anak.
 - 9.1.1. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut jenis Kekerasan.
 - 9.1.2. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut Kelompok umur.
 - 9.1.3. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian.
 - 9.1.4. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menurut Jenis layanan yang diberikan.
 - 9.1.5. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin.
 - 9.1.6. Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan dengan Korban.
- 9.2. Jumlah Anak Jalanan
- 9.3. Pekerja Anak
- 9.4. Pekerja Rumah Tangga Anak
- 9.5. Anak Terlantar
- 9.6. Pekerja Anak di Sektor Berbahaya
- 9.7. Kepemilikan Akta Kelahiran anak
- 9.8. Anak Yang Memanfaatkan Telepon Sahabat Anak
- 9.9. Jumlah Panti Asuhan dan Anak di Panti Asuhan.
- 9.10. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
 - 9.10.1. Jumlah Tenaga Terapis ABK
 - 9.10.2. Fasilitas Kesehatan yang Melayani ABK
 - 9.10.3. Jumlah Tenaga Medis Yaang Melayani ABK
 - 9.10.4. Jumlah SLB
 - 9.10.5. Jumlah Guru di SLB
 - 9.10.6. Jumlah guru Pendamping Khusus
 - 9.10.7. Jumlah Sekolah Inklusif
 - 9.10.8. Jumlah Sekolah Akselerasi
 - 9.10.9. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

- 9.10.10. Jumlah Forum Komunikasi Keluarga ABK
- 9.11. Anak Berhadapan dengan Hukum
 - 9.11.1. Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
 - 9.11.2. Kasus ABH Menurut Jenis Kasus
- 9.12. Tumbuh Kembang Anak
 - 9.12.1. Jumlah Lembaga dan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - 9.12.2. Angka Melek huruf dan Buta Huruf
 - 9.12.3. Jumlah Siswa Putus Sekolah
- 9.13. Kelangsungan Hidup
 - 9.13.1. Jumlah Kematian bayi dan Balita
 - 9.13.2. Jumlah Balita Mendapatkan Imunisasi
 - 9.13.3. Jumlah Bayi dengan Berat Badan Rendah
 - 9.13.4. Jumlah Bayi mendapatkan ASI Eksklusif
 - 9.13.5. Jumlah Kasus Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk
 - 9.13.6. Jumlah Anak Terinfeksi HIV/AIDS
 - 9.13.7. Jumlah Anak Korban NAPZA.
 - 9.13.8. Perkawinan Usia Anak
 - 9.13.8.1. Jumlah Pernikahan Menurut Usia dan Jenis Kelamin
 - 9.13.8.2. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Usia Perkawinan Pertama.

X. Data Kelembagaan

10.1. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

A. Kesehatan:

10.1.1. Jumlah Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI), , Satgas GSI, Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Kelompok Suami Siap Antar Jaga (SIAGA), dan Kader Bina Keluarga Balita (BKB).

- Rumah Sakit Sayang Ibu: adalah rumah sakit pemerintah maupun swasta, umum maupun khusus yang telah melaksanakan 10 langkah menuju perlindungan ibu dan bayi secara terpadu paripurna.
Sumber data : Dinkes Prov/Kab/Kota

B. Pendidikan:

10.1.2. Jumlah Pokjatap Penurunan Buta Aksara Perempuan (PBAP) dan Gugus Tugas PBAP

C. Ekonomi:

10.1.3. Desa Prima

10.1.4. Program P2WKSS, Organisasi UMKM, Koperasi, Organisasi Perempuan Pengusaha, Lembaga Keuangan Mikro, Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Koperasi Perempuan. Kelompok Tani/Nelayan Perempuan.

D. PUG :

10.1.5. Pokja PUG, Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), Forum Perlindungan Perempuan, Focal Point Gender

E. Perlindungan Perempuan dan Anak

10.1.6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan, dan penanganan korban

10.1.7. Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan

10.1.8. Peraturan Daerah yang responsif gender.

10.1.9. Kebijakan Daerah yang responsif gender.

10.1.10. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan

10.1.11. Kebijakan Daerah tentang Perlindungan Perempuan

10.1.12. Lembaga yang Bergerak Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.

10.1.13. Lembaga/Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

10.1.14. Daftar Kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender

10.1.15. Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat/LBH yang Peduli Perempuan dan Anak

- 10.2. Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak
 - 10.2.1. Peraturan Daerah yang Peduli anak
 - 10.2.2. Kebijakan Daerah Yang Peduli Anak
- 10.3. Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak
 - 10.3.1. Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Posyandu, PAUD, Panti asuhan Anak)
- 10.4. Kelembagaan Partisipasi Anak
 - 10.4.1. Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak (Organisasi/Forum Anak, Telepon Sahabat Anak)
- 10.5. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak
 - 10.5.1. Jumlah Kelembagaan Untuk Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak (Gugus Tugas Trafficking, Gugustugas KLA, LPA, KPAID)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 53 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA
 GENDER DAN ANAK

FORMAT DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

A. DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

I. DATA UMUM

Tabel 1.1
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KABUPATEN/KOTA DI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	JUMLAH PENDUDUK				
		L	%	P	%	L+P
1	Kulon Progo					
2	Bantul					
3	Gunungkidul					
4	Sleman					
5	Yogyakarta					
	D.I. YOGYAKARTA					

Sumber data: BPS, Sensus Penduduk

Tabel 1.2
JUMLAH DAN PERSENTASE KEPALA RUMAH TANGGA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA				
		L	%	P	%	L+P
1	Kulon Progo					
2	Bantul					
3	Gunungkidul					
4	Sleman					
5	Yogyakarta					
	D.I. YOGYAKARTA					

Sumber data: BPS, Sensus Penduduk

Tabel 1.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN
DAN KABUPATEN/KOTA DI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Kelompok Umur											
		0-5 Tahun		6-12 Tahun		13-17 Tahun		18-50 Tahun		51 Tahun keatas		TT	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber data: BPS, Sensus Penduduk

Tabel 1.4.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG),
DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI
D.I. YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	IPM	Peringkat	IPG	Peringkat	IDG	Peringkat
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber data: BPS/Kementerian PP&PA

II. BIDANG KESEHATAN

Tabel 2.1
ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)		
		L	P	L+P
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data: BPS/Kementerian PP&PA

Tabel 2.2
JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL, MELAHIRKAN, DAN NIFAS
MENURUT KELOMPOK USIA DAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	USIA KEMATIAN IBU			Jumlah Kematian Ibu
		< 20	20- 35	>35	
1	Kulon Progo				
2	Bantul				
3	Gunungkidul				
4	Sleman				
5	Yogyakarta				
	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber data: Dinkes

Tabel 2.3
PERSENTASE PENYEBAB KEMATIAN IBU PADA MASA HAMIL,
MELAHIRKAN DAN NIFAS MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Penyebab kematian Ibu pada masa hamil, melahirkan dan nifas							
		Eklamsia %	Infeksi %	Abortus %	P. Lama/Macet %	Emboli Obstetri %	Kompl Masa Puepureum %	Lain-lain %	Perdara-han %
1	Kulon Progo								
2	Bantul								
3	Gunungkidul								
4	Sleman								
5	Yogyakarta								
	D.I. YOGYAKARTA								

Sumber data: Dinkes

Tabel 2.4
JUMLAH DAN PERSENTASE KELAHIRAN BERDASARKAN PENOLONG PERSALINAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Jml Kelahiran	Penolong Persalinan							
			Dokter	%	Bidan	%	Dukun	%	Lainnya	%
1	Kulon Progo									
2	Bantul									
3	Gunungkidul									
4	Sleman									
5	Yogyakarta									
	D.I. YOGYAKARTA									

Sumber data: Dinkes

Tabel 2.5
JUMLAH DAN PERSENTASE CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL (K1/K4) KE
SARANA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	JML IBU HAMIL	K1		K4	
			Jml	%	Jml	%
1	Kulon Progo					
2	Bantul					
3	Gunungkidul					
4	Sleman					
5	Yogyakarta					
	D.I. YOGYAKARTA					

Sumber data: Dinkes

Tabel 2.6.
JUMLAH DAN PERSENTASE IMUNISASI TETANUS TOXOID (TT)
PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	JML IBU HAMIL	JML mendapat TT	% mendapat TT
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data: Dinkes

Tabel 2.7.
JUMALH DAN PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN
TABLET ZAT BESI (Fe) MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	JML IBU HAMIL	Mendapat Fe1		Mendapat Fe3	
			Jml	%	Jml	%
1	Kulon Progo					
2	Bantul					
3	Gunungkidul					
4	Sleman					
5	Yogyakarta					
	D.I. YOGYAKARTA					

Sumber data: Dinkes

Tabel 2.8
JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL YANG BERESIKO
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	JUMLAH BUMIL	BUMIL KEK	% BUMIL KEK	BUMIL RISTI	% BUMIL RISTI
1	Kulon Progo					
2	Bantul					
3	Gunungkidul					
4	Sleman					
5	Yogyakarta					
	D.I. YOGYAKARTA					

Sumber data: Dinkes.

Tabel 2.9.
JUMLAH PENDERITA HIV/AIDS MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	PENDERITA HIV			PENDERITA AIDS		
		P	L	P+L	P	L	P+L
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber data: Dinkes

Tabel 2.10a
JUMLAH PERNIKAHAN MENURUT USIA PERKAWINAN, JENIS KELAMIN,
DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	USIA PERKAWINAN															
		<16		<19		17-21		19-21		22-25		26-30		31-35		>36	
		P	L	P	L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Kulon Progo																
2	Bantul																
3	Gunungkidul																
4	Sleman																
5	Yogyakarta																
	D.I. YOGYAKARTA																

Sumber data: Kanwil Kemenag

Tabel 2.10b.
PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN USIA 10 TAHUN KE ATAS
MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO	KAB./KOTA	<16 th	17-18 th	19-24 th	>=25 th
1	Kulon Progo				
2	Bantul				
3	Gunungkidul				
4	Sleman				
5	Yogyakarta				
	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber data: BPS

Tabel 2.11
JUMLAH PESERTA / AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Peserta KB Perempuan						Peserta KB laki-laki			Total
		MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jumlah	MOP	Kondom	Jumlah	
1	Kulon Progo										
2	Bantul										
3	Gunungkidul										
4	Sleman										
5	Yogyakarta										
	D.I. YOGYAKARTA										

Sumberdata : BKKBN

Tabel 2.12
UNMET NEED, JUMLAH PUS DAN JUMLAH WUS MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	UNMET NEED	JUMLAH PUS	JUMLAH WUS
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumberdata : BKKBN

Tabel 2.13.
PENGGUNA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Pegguna NAPZA		
		L	P	L+P
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : Badan Narkotika D.I. Yogyakarta

III. BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 3.1
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo									
2	Bantul									
3	Gunungkidul									
4	Sleman									
5	Yogyakarta									
	D.I. YOGYAKARTA									

Sumber data: Dikpora D.I. Yogyakarta

Tabel 3.2
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)
MENURUT KELOMPOK USIA SEKOLAH, JENIS KELAMIN, DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	7-12			13-15			16-18		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo									
2	Bantul									
3	Gunungkidul									
4	Sleman									
5	Yogyakarta									
	D.I. YOGYAKARTA									

Sumber data: Dikpora D.I. Yogyakarta

Tabel 3.3
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo									
2	Bantul									
3	Gunungkidul									
4	Sleman									
5	Yogyakarta									
	D.I. YOGYAKARTA									

Sumber data: Dikpora D.I. Yogyakarta

Tabel 3.4.
ANGKA MELEK HURUF (AMH)
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	Usia >10			Usia >15			Usia 15-24		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo									
2	Bantul									
3	Gunungkidul									
4	Sleman									
5	Yogyakarta									
	D.I. YOGYAKARTA									

Sumber data: : BPS, Susenas.

Tabel 3.5
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENURUT
JENJANG PENDIDIKAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo									
2	Bantul									
3	Gunungkidul									
4	Sleman									
5	Yogyakarta									
	D.I. YOGYAKARTA									

Sumber data: Dikpora D.I. Yogyakarta

Tabel 3.6.
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS PENDIDIKAN TERTINGGI
YANG DITAMATKAN, JENIS KELAMIN, DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	SD			SLTP			SLTA			Akademi/PT		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber data: BPS, Susenas.

Tabel 3.7.
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN) MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data: BPS.

Tabel 3.8
JUMLAH GURU NEGERI/SWASTA MENURUT
JENJANG PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN, DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	Guru SD			Guru SLTP			Guru SLTA			L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Kulon Progo										
2	Bantul										
3	Gunungkidul										
4	Sleman										
5	Yogyakarta										
	D.I. YOGYAKARTA										

Sumber data: Dikpora D.I. Yogyakarta

Tabel 3.9
JUMLAH GURU YANG TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKASI
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN, DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	Guru SD			Guru SLTP			Guru SLTA			L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Kulon Progo										
2	Bantul										
3	Gunungkidul										
4	Sleman										
5	Yogyakarta										
	D.I. YOGYAKARTA										

Sumber data: Dikpora D.I. Yogyakarta

Tabel 3.10.
JUMLAH PESERTA KEJAR PAKET A, B, DAN C SERTA KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

No	KAB/KOTA	Paket A			Paket B			Paket C			KF		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber data: Dikpora D.I. Yogyakarta

Tabel 3.11.
JUMLAH KELULUSAN PAKET A, B, DAN C MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

No	KAB/KOTA	Paket A			Paket B			Paket C		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo									
2	Bantul									
3	Gunungkidul									
4	Sleman									
5	Yogyakarta									
	D.I. YOGYAKARTA									

Sumber data: Dikpora D.I. Yogyakarta

TABEL 3.12.
JUMLAH PENERIMA BEASISWA TINGKAT SLTP DAN SLTA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

No	KAB/KOTA	SLTP			SLTA			L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Kulon Progo							
2	Bantul							
3	Gunungkidul							
4	Sleman							
5	Yogyakarta							
	D.I. YOGYAKARTA							

Sumber data: Dikpora dan Kemenag. D.I. Yogyakarta

Tabel 3.13a
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo									
2	Bantul									
3	Gunungkidul									
4	Sleman									
5	Yogyakarta									
	D.I. YOGYAKARTA									

Sumber data: Dikpora D.I. Yogyakarta

Tabel 3.13b
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DI BIDANG SENI
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo									
2	Bantul									
3	Gunungkidul									
4	Sleman									
5	Yogyakarta									
	D.I. YOGYAKARTA									

Sumber data: Dikpora D.I. Yogyakarta

Tabel 3.13c
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DI BIDANG OLAH RAGA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo									
2	Bantul									
3	Gunungkidul									
4	Sleman									
5	Yogyakarta									
	D.I. YOGYAKARTA									

Sumber data: Dikpora D.I. Yogyakarta

IV. BIDANG SUMBERDAYA ALAM (SDA) DAN LINGKUNGAN

**Tabel 4.1.
GERAKAN MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN**

No	Nama Aliansi/Wadah Perempuan Peduli Lingkungan	Handphone / Telepon / E-mail	Ketua	Keterangan
1				
2				
...				
...				
n				

Sumber Data: BLH D.I. Yogyakarta/ LSM

**Tabel 4.2
DAMPAK BENCANA LINGKUNGAN TERHADAP GENDER DAN ANAK
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN**

No	Jenis Bencana	Korban Bencana Lingkungan				Keterangan
		Dewasa		Anak-anak		
		L	P	L	P	
1	Tsunami					
2	Gempa Bumi					
3	Banjir Bandang					
4	Longsor					
5	Angin Puting Beliung					
6	Letusan Gunung					
7	Pencemaran Udara					

Sumber Data: BLH D.I. Yogyakarta/ LSM

V. BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Tabel 5.1
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN, DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA									
		SD		SLTA		SLTA		SARJANA / DIPLOMA		TOTAL	
		L	p	L	p	L	p	L	p	L	p
1	Kulon Progo										
2	Bantul										
3	Gunungkidul										
4	Sleman										
5	Yogyakarta										
	D.I. YOGYAKARTA										

Sumber data: BPS, Sakernas

Tabel 5.2.
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : BPS

Tabel 5.3a
TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH DAERAH (AKAD)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Tenaga kerja migran Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : Nakertrans

Tabel 5.3b.
TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Tenaga kerja migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN)		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : Nakertrans

Tabel 5.4
PEKERJA DI SEKTOR FORMAL MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Pekerja di 42ector formal		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : BPS, Sakernas

Tabel 5.5
PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL MENURUT
JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Pekerja di 42ector informal		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : BPS, Sakernas

Tabel 5.6
JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)
MENURUT JENIS KELAMIN PEMILIK USAHA DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Pemilik Usaha Kecil		L+P
		L	P	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : Deperindagkop

Tabel 5.7
KEANGGOTAAN KOPERASI MENURUT JENIS KELAMIN
DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Keanggotaan Koperasi		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : Deperindagkop D.I. Yogyakarta

TABEL 5.8.
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Pengangguran Terbuka		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : BPS, Sakernas

TABEL 5.9.
JUMLAH PEKERJA TIDAK DIBAYAR
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Pekerja Tidak di Bayar		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : BPS, Sakernas

Catatan : Pekerja tdk dibayar merupakan pekerja keluarga

Tabel 5.10.
JUMLAH DAN PROSENTASE PEREMPUAN PEKERJA PROFESIONAL
DAN MANJERIAL MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial	
		Jumlah	Prosentase
1	Kulon Progo		
2	Bantul		
3	Gunungkidul		
4	Sleman		
5	Yogyakarta		
	D.I. YOGYAKARTA		

Sumber data : BPS, Sakernas

5.11. Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, dan Jenis Pekerjaan

Tabel 5.11.1.
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA,
JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Jenis Kelamin	Lapangan Usaha				
			1	2	3	4	5
1	Kulon Progo	L					
		P					
		L+ P					
2	Bantul	L					
		P					
		L+ P					
3	Gunungkidul	L					
		P					
		L+ P					
4	Sleman	L					
		P					
		L+ P					
5	Yogyakarta	L					
		P					
		L+ P					
	D.I. YOGYAKARTA	L					
		P					
		L+ P					

Sumber Data : BPS, Sakernas

Keterangan :

- 1 = Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- 2 = Industri Pengolahan
- 3 = Perdagangan Besar, Eceran, Rumahmakan dan Hotel
- 4 = Jasa Kemasyarakatan
- 5 = Lainnya

Tabel 5.11.2.
JUMLAH PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN,
JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Jenis Kelamin	Status Pekerjaan						
			1	2	3	4	5	6	7
1	Kulon Progo	L							
		P							
		L+ P							
2	Bantul	L							
		P							
		L+ P							
3	Gunungkidul	L							
		P							
		L+ P							
4	Sleman	L							
		P							
		L+ P							
5	Yogyakarta	L							
		P							
		L+ P							
	D.I. YOGYAKARTA	L							
		P							
		L+ P							

Sumber Data : BPS, Sakernas

Keterangan :

1. Berusaha Sendiri
2. Berusaha Dibantu (buruh tidak tetap)
3. Berusaha dibantu (Buruh tetap)
4. Buruh/karyawan
5. Pekerja bebas di pertanian
6. Pekerja bebas non pertanian
7. Pekerja tak dibayar

Tabel 5.11.3.
JUMLAH PENDUDUK BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN,
JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Jenis Kelamin	Jenis Pekerjaan					Jumlah
			1	2	3	4	5	
1	Kulon Progo	L						
		P						
		L+ P						
2	Bantul	L						
		P						
		L+ P						
3	Gunungkidul	L						
		P						
		L+ P						
4	Sleman	L						
		P						
		L+ P						
5	Yogyakarta	L						
		P						
		L+ P						
D.I. YOGYAKARTA		L						
		P						
		L+ P						

Sumber Data : BPS, Sakernas

Keterangan :

1 = Tenaga Profesional, Teknisi dan Tenaga lain Ybdi

2 = Tenaga Kepemimpinan & ketatalaksanaan dan Pejabat Pelaksana, tenaga TU dan Tenaga Ybdi

3 = Tenaga Usaha Penjualan

4 = Tenaga Usaha Jasa & TU Tani, Kebun, Ternak, Ikan, Hutan & Perburuan

5 = Tenaga Produksi, operasional angkutan & Pekerja Kasar Lainnya

D.. BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

6.1. Perempuan di Lembaga Eksekutif

Tabel 6.1.1
JUMLAH BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Bupati/Walkot		Wakil Bupati/Walkot		L+P
		L	P	L	P	
1	Kulon Progo					
2	Bantul					
3	Gunungkidul					
4	Sleman					
5	Yogyakarta					
	D.I. YOGYAKARTA					

Sumber data: Biro Pemerintahan Setda Prov. DIY

Tabel 6.1.2
JUMLAH CAMAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data: Biro Pemerintahan Setda Prov. DIY

Tabel 6.1.3
JUMLAH KEPALA DESA/LURAH MENURUT JENIS KELAMIN DAN
KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	KAB./KOTA	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data: Biro Pemerintahan Setda Prov. DIY

Tabel 6.1.4
JUMLAH PEJABAT MENURUT JENIS JABATAN, JENIS KELAMIN, DAN
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Eselon V		Fungsional umum		Fungsional tertentu	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo														
2	Bantul														
3	Gunungkidul														
4	Sleman														
5	Yogyakarta														
6	Prov. DIY														
	Jumlah														

Sumber Data: BKD & Kabupaten/Kota

Tabel 6.1.5
JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN, JENIS KELAMIN, DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO	KAB./KOTA	GOLONGAN I		GOLONGAN II		GOLONGAN III		GOLONGAN IV	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo								
2	Bantul								
3	Gunungkidul								
4	Sleman								
5	Yogyakarta								
6	Prov. DIY								
	Jumlah								

Sumber Data: BKD & Kabupaten/Kota

Tabel 6.1.6
TIM BADAN PERTIMBANGAN DAN KEPANGKATAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data BKD Kab/Kota dan Prov

6.2. Perempuan di Lembaga Legislatif :

Tabel 6.2.1
JUMLAH ANGGOTA DPRD MENURUT KOMISI, JENIS KELAMIN, DAN
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

No	KAB./KOTA	Komisi									
		A		B		C		D		E	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo										
2	Bantul										
3	Gunungkidul										
4	Sleman										
5	Yogyakarta										
6	Prov. DIY										
	Jumlah										

Sumber data : Sekretariat DPRD Kab/Kota/

Tabel 6.2.2
JUMLAH CALON LEGISLATIF DAN PENGURUS HARIAN PARTAI POLITIK MENURUT
JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Caleg			Pengurus Harian Parpol		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
6	Prov. DIY						
	Jumlah						

Sumber : Badan Kesbanglinmas DIY

TABEL 6.2.3.
JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA KAUKUS PEREMPUAN POLITIK
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	KAB./KOTA	Kaukus Perempuan Politik	
		Jumlah Pengurus	Jumlah Anggota
1	Kulon Progo		
2	Bantul		
3	Gunungkidul		
4	Sleman		
5	Yogyakarta		
6	Prov. DIY		
	Jumlah		

Sumber data BPPM PROV.

Tabel 6.2.4
JUMLAH ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Anggota BPD		L+P
			L	P	
1	Kulon Progo				
2	Bantul				
3	Gunungkidul				
4	Sleman				
5	Yogyakarta				
	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber data : Biro Pemerintahan Setda Prov. DIY

6.3 Perempuan di Lembaga Yudikatif

Tabel 6.3.1
JUMLAH JAKSA MENURUT JABATAN JAKSA, JENIS KELAMIN, DAN WILAYAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO	WILAYAH	JENIS JABATAN JAKSA					
		STRUKTURAL		FUNGSIONAL		JUMLAH	
		L	P	L	P	L	P
1	KEJATI PROV.DIY.						
2	KN. WATES						
3	KN. BANTUL						
4	KN. GUNUNGKIDUL						
5	KN. SLEMAN						
6	KN. YOGYAKARTA						
	Jumlah						

Sumber Data:Kejati dan Kejaksaan Negeri

Tabel 6.3.2
JUMLAH HAKIM DAN PEJABAT MENURUT JENIS JABATAN HAKIM DAN JENIS KELAMIN
DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN....

No	Jenis Jabatan Hakim	Jumlah		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta			
2	Pejabat Struktural pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta			
3	Pejabat Fungsional pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta			
4	Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta			
5	Pejabat Struktural pada PTA Yogyakarta			
6	Pejabat Fungsional pada PTA Yogyakarta			
	Jumlah			

Sumber data : PTN/PTA

Tabel 6.3.3
JUMLAH HAKIM MENURUT JENIS JABATAN HAKIM, JENIS KELAMIN
DI PENGADILAN NEGERI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN....

NO	PENGADILAN NEGERI	JENIS JABATAN HAKIM					
		KETUA		WK.KETUA		ANGGOTA	
		L	P	L	P	L	P
1	WATES						
2	BANTUL						
3	WONOSARI						
4	SLEMAN						
5	YOGYAKARTA						
	Jumlah						

Sumber data : PTN/PTA

Tabel. 6.3.4.
JUMLAH POLISI MENURUT JENIS KEPANGKATAN DAN JENIS KELAMIN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Perwira Tinggi (Pati) :			
	Brigadir Jenderal Polisi			
2	Perwira Menengah (Pamen)			
A	Komisaris Besar Polisi			
B	Ajun Komisaris Besar Polisi			
C	Komisaris Polisi			
3	Perwira Pertama (Pama)			
A	Ajun Komisaris Polisi			
B	Inspektur Satu Polisi			
C	Inspektur Dua Polisi			
4	Bintara			
	Jumlah			

Sumber Data: Polda/Polres

Tabel 6.3.5
JUMLAH PEJABAT KEPOLISIAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN WILAYAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN....

No	WILAYAH	PEJABAT DI KEPOLISIAN					
		KAPOLDA /KAPOLRES			KAPOLSEK		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Polda Prov. DIY						
2	Polres Kulon Progo						
3	Polres Bantul						
4	Polres Gunungkidul						
5	Polres Sleman						
6	Polresta Kota Yogyakarta						
7	Jumlah						

Sumber data: Polda dan Polres

VII. BIDANG HUKUM DAN SOSIAL-BUDAYA
D.I. Jumlah Penghuni Lapas

Tabel 7.1.1
JUMLAH PENGHUNI LAPAS MENURUT JENIS LAPAS DAN TINGKAT PENDIDIKAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Jenis Lapas	PENDIDIKAN				
		SD	SLP	SLA	PT	Jumlah
1	Umum					
2	Anak					
3	Perempuan					

Sumber Data: Kanwil Hukum dan HAM

Tabel 7.1.2
JUMLAH PENGHUNI LAPAS MENURUT JENIS LAPAS DAN KELOMPOK UMUR
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Lapas	Kelompok Umur (Tahun)													
		≤ 12		13 - 17		18 - 22		23-27		31- 35		40-50		> 50	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Umum														
2	Anak														
3	Perempuan														

Sumber Data: Kanwil Hukum dan HAM

TABEL. 7.1.3
JUMLAH PENGHUNI LAPAS MENURUT JENIS LAPAS DAN JENIS KASUS DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Lapas	Kasus							
		Pembunuhan	Pencurian	Pemeriksaan	Asusila	NAPZA	KDRT	Korupsi	Lainnya
1	Umum								
2	Anak								
3	Prempuan								

Sumber Data: Kanwil Hukum dan HAM

TABEL 7.1.4
JUMLAH JENIS LAPAS MENURUT KAB/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2011

No	KAB./KOTA	Lapas Umum (Laki-laki)	Lapas Anak	Lapas Prempuan
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber Data: Kanwil Hukum dan HAM

D.I. Jumlah Penghuni Rumah Tahanan

Tabel. 7.2
JUMLAH PENGHUNI RUMAH TAHANAN (RUTAN) MENURUT JENIS KELAMIN DAN RUTAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

No	RUTAN	Jumlah penghuni Rutan		L+P
		L	P	
1	Wates			
2	Bantul			
3	Wonosari			
4	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber Data: Kanwil Hukum dan HAM

7.3. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Tabel 7.3.1.
PENDUDUK LANSIA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ...

No	KAB./KOTA	Tidak /Belum Sekolah		Belu m Tama t SD		SD/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SMA/ Sederajat		Pergur uan Tinggi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber data:BPS

Tabel 7.3.2
JUMLAH PENDUDUK LANSIA MENURUT AKTIVITAS YANG DILAKUKAN,
JENIS KELAMIN, DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Aktivitas yang dilakukan											
		Pertanian		Pertamb a ngan		Indust ri/Pen golaha n		Perdagan gan		Jasa/S osial		Lain-lain	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber data: BPS/Dinsos

7.4. Penyandang Disabilitas (Penda)

Tabel 7.4.1
JUMLAH PENDA MENURUT JENIS KELAMIN, TINGKAT PENDIDIKAN,
DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB./KOTA	Tidak /Belum Sekolah		Belu m Tama t SD		SD/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SMA/ Sederajat		Pergur uan Tinggi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber data: Dikpora

TABEL 7.4.2
PENDA MENURUT AKTIVITAS YANG DILAKUKAN, JENIS KELAMIN
DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	KAB./KOTA	Aktivitas yang dilakukan											
		Pertanian		Pertambangan		Industri/Pengolahan		Perdagangan		Jasa/Sosial		Lain-lain	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber data: BPS/Dinsos

Tabel 7.5
JUMLAH PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK/BENCANA
MENURUT USIA, JENIS KELAMIN DAN KAB/KOTA
DI PROV.DIY TAHUN ...

No	KAB./KOTA	PENGUNGSI KONFLIK/BENCANA					
		Usia 0-17 Tahun			Usia >18 Tahun		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
6	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 7.6
JUMLAH KASUS PERCERAIAN YANG DIPUTUS DI PENGADILAN AGAMA
MENURUT SUMBER PERMOHONAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH KASUS	SUMBER PERMOHONAN	
			PERMOHONAN SUAMI	GUGATAN ISTRI
1.	Kulon Progo			
2.	Bantul			
3.	Gunungkidul			
4.	Sleman			
5.	Yogyakarta			
6	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data: Pengadilan Tinggi Agama DIY

VIII. KEKERASAN

8.1. Kekerasan Terhadap Perempuan

TABEL 8.1.1
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			Total
		Anak (0<18 Tahun)	Remaja (18-<25 Tahun)	25 Tahun ke atas	
1	Kulon Progo				
2	Bantul				
3	Gunungkidul				
4	Sleman				
5	Yogyakarta				
	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber data FPKK

TABEL 8.1.2.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan					
		Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	Perguruan Tinggi
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber data FPKK

TABEL 8.1.3.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT STATUS PEKERJAAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kab/Kota	Status Pekerjaan						
		Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh/Karyawan/Pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja bebas di non pertanian	Pekerja keluarga
1	Kulon Progo							
2	Bantul							
3	Gunung kidul							
4	Sleman							
5	Yogyakarta							
	D.I. YOGYAKARTA							

Sumber data FPKK

Tabel 8.1.4
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT STATUS PERKAWINAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kabupaten/Kota	Status Perkawinan		
		Belum Kawin	Kawin	Cerai
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data FPKK

TABEL 8.1.5.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT JENIS KEKERASAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber data FPKK

TABEL 8.1.6
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TEMPAT KEJADIAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kabupaten/Kota	Tempat Kejadian		
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data FPKK

TABEL 8.1.7
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kabupaten/Kota	Jenis layanan yang diberikan				
		Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan & Reintegrasi
1	Kulon Progo					
2	Bantul					
3	Gunungkidul					
4	Sleman					
5	Yogyakarta					
	D.I. YOGYAKARTA					

Sumber data FPKK

TABEL 8.1.8
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT FREKUENSI KEKERASAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kabupaten/Kota	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data FPKK

TABEL 8.1.9
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT KELOMPOK UMUR , JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Kelompok Umur			Total
		L	P	Anak (0<18 Tahun)	Remaja (18-<25 Tahun)	25 Tahun ke atas	
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber data FPKK

TABEL 8.1.10
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kab/Kota	Tidak/Belum Sekolah		Belum Tamat SD		SD/Sederajat		SMP/Sederajat		SMA/Sederajat		Perguruan Tinggi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber data FPKK

TABEL 8.1.11
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT STATUS PEKERJAAN, JENIS KELAMIN, DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kab/Kota	Bekerja		Tidak/Belum Bekerja		Total		
		L	P	L	P	L	P	L+P
1	Kulon Progo							
2	Bantul							
3	Gunungkidul							
4	Sleman							
5	Yogyakarta							
	D.I. YOGYAKARTA							

Sumber data FPKK

TABEL 8.1.12
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT HUBUNGAN DENGAN KORBAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	Kabupaten/Kota	Hubungan dengan Korban							
		Orang Tua		Keluarga		Suami	Istri	Lainnya	
		L	P	L	P			L	P
1	Kulon Progo								
2	Bantul								
3	Gunungkidul								
4	Sleman								
5	Yogyakarta								
	D.I. YOGYAKARTA								

Sumber data FPKK

TABEL 8.1.13
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT KEBANGSAAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No.	Kabupaten/Kota	Kebangsaan			
		Indonesia		Asing	
		L	P	L	P
1	Kulon Progo				
2	Bantul				
3	Gunungkidul				
4	Sleman				
5	Yogyakarta				
	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber data FPKK

8.2. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)

**TABEL 8.2.1
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...**

NO.	KAB./KOTA	KELOMPOK UMUR				TOTAL	
		0 - 18 Thn (Anak)		>18 Thn (Dewasa)			
		L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah

**TABEL 8.2.2
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT PENDIDIKAN,
JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...**

NO	KAB/KOTA	TINGKAT PENDIDIKAN									
		Tidak Sekolah		SD/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SMA/ Sederajat		PT	
		L	L	P	L	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo										
2	Bantul										
3	Gunungkidul										
4	Sleman										
5	Yogyakarta										
	D.I. YOGYAKARTA										

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah

TABEL 8.2.3.
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT STATUS PERKAWINAN, JENIS
KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA PERIODE JANUARI – JUNI
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

NO	KAB/KOTA	STATUS PERKAWINAN					
		Belum Kawin		Kawin		Cerai	
		L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah

TABEL 8.2.4.
JUMLAH KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT JENIS LAYANAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	KAB/KOTA	Pendataan/ Identifikasi	Layanan Psikososial	Rehabilitasi Medis	Rehabilitasi Sosial	Bantuan Hukum	Pemulangan	Reintegrasi Sosial
1	Kulon Progo							
2	Bantul							
3	Gunungkidul							
4	Sleman							
5	Yogyakarta							
	D.I. YOGYAKARTA							

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah

TABEL 8.2.5
JUMLAH PELAKU KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT
TINGKATAN PROSES HUKUM, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

NO	KAB/KOTA	TINGKATAN PROSES HUKUM						KETERANGAN
		Penyidikan		Penuntutan		Putusan Pengadilan		
		L	P	L	P	L	P	
1	Kulon Progo							
2	Bantul							
3	Gunungkidul							
4	Sleman							
5	Yogyakarta							
	D.I. YOGYAKARTA							

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah

TABEL 8.2.6
AMAR PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

NO	KAB/KOTA	AMAR PUTUSAN						KETERANGAN
		Pidana (Thn)		Denda (Rp.)		Restitusi (Rp.)		
1	Kulon Progo							
2	Bantul							
3	Gunungkidul							
4	Sleman							
5	Yogyakarta							
	DIY							

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah

TABEL 8.2.7
GUGUS TUGAS DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMEBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No.	KAB/KOTA	Gugus Tugas		Rencana Aksi Daerah PP-TPPO		Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)		Produk Hukum (Perda/SK/SE)
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Jumlah
1	Kulon Progo							
2	Bantul							
3	Gunungkidul							
4	Sleman							
5	Yogyakarta							
	D.I. YOGYAKARTA							

Sumber data : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah

IX. DATA ANAK

9.1. Kekerasan Terhadap Anak

**TABEL 9.1.1
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT JENIS KEKERASAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...**

No	KAB/KOTA	Jenis Kekerasan											
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplorasi		Penelantaran		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber data FPKK

**Tabel 9.1.2.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN**

No	KAB/KOTA	Kelompok Umur						Total			
		0-5 Tahun		6-10 Tahun		11-18 Tahun					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L+P	
1	Kulon Progo										
2	Bantul										
3	Gunungkidul										
4	Sleman										
5	Yogyakarta										
	D.I. YOGYAKARTA										

Sumber data FPKK

TABEL 9.1.3
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT TEMPAT KEJADIAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	Tempat Kejadian							
		Rumah		Lingkungan		Sekolah		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo								
2	Bantul								
3	Gunungkidul								
4	Sleman								
5	Yogyakarta								
	D.I. YOGYAKARTA								

Sumber data FPKK

TABEL. 9.1.4
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	KAB/KOTA	Jenis Layanan Yang Diberikan									
		Penanganan Pengaduan		Pelayanan Kesehatan		Rehabilitasi Sosial		Penegakan dan Bantuan Hukum		Pemulangan & Reintegrasi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo										
2	Bantul										
3	Gunungkidul										
4	Sleman										
5	Yogyakarta										
	D.I. YOGYAKARTA										

Sumber data FPKK

TABEL 9.1.5
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	KAB/KOTA	Jenis Kelamin		Kelompok Umur			Total
		L	P	Anak (0<18 Tahun)	Remaja (18-<25 Tahun)	25 Tahun ke atas	
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber data FPKK

TABEL 9.1.6
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT HUBUNGAN PELAKU, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ...

No	KAB/KOTA	Hubungan Pelaku Dengan Korban										
		Orang Tua		Keluarga		Tetangga		Petugas di sekolah (Guru dll)		Lainnya Sebutkan		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kulon Progo											
2	Bantul											
3	Gunungkidul											
4	Sleman											
5	Yogyakarta											
	D.I. YOGYAKARTA											

Sumber data FPKK

TABEL 9.2
JUMLAH ANAK JALANAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	Jenis kelamin		Total
		L	P	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber Data : Dinsos

TABEL 9.3.
JUMLAH PEKERJA ANAK (BERUMUR 10-17 TAHUN)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	Jenis kelamin		Total
		L	P	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber : Dinas Nakertrans/BPS

TABEL 9.4
JUMLAH PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN.....

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber : Dinas Nakertrans/BPS

TABEL 9.5
JUMLAH ANAK TERLANTAR
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN.....

No	KAB/KOTA	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber Data: Dinas sosial

TABEL 9.6
JUMLAH PEKERJA ANAK DI SEKTOR BERBAHAYA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN.....

No	KAB/KOTA	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber Data : Dinas Nakertrans/LSM

TABEL 9.7
PROSENTASE ANAK YANG BERUMUR DIBAWAH 18 TAHUN
MENURUT KEPEMILIKAN AKTA LAHIR, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	Jumlah Anak Usia <18 Tahun	Memiliki Akta Lahir			Tidak Memiliki Akta Lahir		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo							
2	Bantul							
3	Gunungkidul							
4	Sleman							
5	Yogyakarta							
	D.I. YOGYAKARTA							

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota.

TABEL 9.8
JUMLAH ANAK YANG MEMANFAATKAN TELEPON SAHABAT ANAK
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	Jumlah Anak Yang Memanfaatkan TESA		Total (L+P)
		L	P	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber Data: Tesa 129 Prov. DIY

TABEL 9.9
JUMLAH PANTI ASUHAN DAN ANAK YANG DITAMPUNG DI PANTI ASUHAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No.	KAB/KOTA	Jumlah Panti Asuhan	Anak Yang Ditampung Di Panti Asuhan		
			L	P	L+P
1	Kulon Progo				
2	Bantul				
3	Gunungkidul				
4	Sleman				
5	Yogyakarta				
	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber Data: Dinas Sosial

9.10. ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.

TABEL 9.10.1.
JUMLAH TENAGA TERAPHIS ABK
MENURUT JENIS PELAYANAN KESEHATAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

No	KAB/KOTA	Jenis pelayanan kesehatan					
		Puskesmas		Rumah Sakit		Klinik	
		L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
	DIY						

Sumber Data: Dinas Kesehatan

TABEL 9.10.2.
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MELAYANI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
(ABK) MENURUT JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

No	KAB/KOTA	Jenis Pelayanan Kesehatan		
		Puskesmas	Rumah Sakit	Klinik
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber Data: Dinas Kesehatan

TABEL 9.10.3.
JUMLAH TENAGA MEDIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) MENURUT
JENIS TENAGA MEDIS, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

No	KAB/KOTA	Jenis Tenaga Medis					
		Dokter Anak		Dokter Rehab Medis		Psikolog	
		L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber Data: Dinas Kesehatan

TABEL 9.10.4
JUMLAH SLB NEGERI DAN SWASTA
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

N O	KAB/KOTA	SLB Negeri				Ju ml ah	SLB Swasta				Ju ml ah
		TK	SD	SMP	SMA		TK	SD	SMP	SMA	
1	Kulon Progo										
2	Bantul										
3	Gunungkidul										
4	Sleman										
5	Yogyakarta										
	D.I. YOGYAKARTA										

Sumber Data: Dinas Pendidikan

TABEL 9.10.5.
JUMLAH GURU NEGERI DAN SWASTA DI SLB
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

N o	KAB/ KOTA	Guru Negeri di SLB								Jum lah	Guru Swasta di SLB								Jumla h	
		TK		SD		SMP		SMA			TK		SD		SMP		SMA			
		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P				
1	Kulon Progo																			
2	Bantul																			
3	Gunungkidul																			
4	Sleman																			
5	Yogyakarta																			
	D.I. YOGYAKARTA																			

Sumber Data: SIM DIT. PSLB2009, Dinas Pendidikan

TABEL 9.10.6.
JUMLAH GURU PENDAMPING KHUSUS MENURUT JENJANG PENDIDIKAN,
JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

No	KAB/KOTA	Sekolah							
		TK LB		SD LB		SMP LB		SMA LB	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo								
2	Bantul								
3	Gunungkidul								
4	Sleman								
5	Yogyakarta								
	D.I. YOGYAKARTA								

Sumber Data: Dinas Pendidikan

TABEL 9.10.7.
JUMLAH SEKOLAH INKLUSIF (ABK, ANAK ANAK CERDAS DAN BERBAKAT),
JUMLAH RUANG KELAS DAN JUMLAH SISWA
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

No	KAB/KOTA	Sekolah Inklusif											
		Jenjang Pendidikan			Ruang Kelas			Jumlah Siswa					
		SD	SM P	SMA	SD	SMP	SMA	SD		SMP		SMA	
								L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKART A												

Sumber data: Dinas Pendidikan

TABEL 9.10.8.
JUMLAH SEKOLAH AKSELERASI (ABK, ANAK ANAK CERDAS DAN BERBAKAT),
JUMLAH RUANG KELAS DAN JUMLAH SISWA
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

No	KAB/KOTA	Sekolah Akselerasi											
		Tingkat				Ruang Kelas				Jumlah Siswa			
		SMP		SMA		SMP		SMA		SMP		SMA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber data: Dinas Pendidikan

TABEL 9.10.9.
JUMLAH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)
MENURUT JENIS ABK , JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

No	KAB/KOTA	Jenis ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)												Total												
		1		2		3		4		5		6			7		8		9		10		11		12	
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1	Kulon Progo																									
2	Bantul																									
3	Gunungkidul																									
4	Sleman																									
5	Yogyakarta																									
	D.I. YOGYAKARTA																									

Sumber Data : BPS, Dinas Pendidikan/ Dinas Sosial, Lembaga Masyarakat yang peduli ABK

Keterangan Jenis ABK:

1. Tuna Netra
2. Tuna Rungu
3. Tuna Grahita
4. Tuna Daksa
5. Tuna Laras
6. Anak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata dan/atau bakat istimewa
7. Tuna Ganda
8. Autis
9. Gangguan pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas/ GPPH (Attention and hyperactivity Disorder/ ADHD)
10. Lamban Belajar
11. Kesulitan Belajar
12. Gangguan Komunikasi

TABEL 9.10.10.
JUMLAH FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ABK MENURUT
BENTUK DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

No	KAB/KOTA	Bentuk			Jumlah
		Forum Komunikasi Keluarga ABK (anak dengan kecacatan)	YPAC	Aliansi RBM	
1	Kulon Progo				
2	Bantul				
3	Gunungkidul				
4	Sleman				
5	Yogyakarta				
	DIY				

Sumber Data: Dinas Sosial & Lembaga Masyarakat yang peduli ABK

9.11. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

TABEL 9.11.1.
JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ..

No	KAB/KOTA	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber Data: Kementerian Hukum dan HAM, UPPA, Rumah Tahanan, Bapas/Lapas, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan

TABEL 9.11.2.
JUMLAH KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENURUT JENIS KASUS, JENIS KELAMIN DAN PENEGAK HUKUM
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Penegak hukum	Pencurian		Asusila		Pembunuhan		Narkotika		Penganiayaan		Lainnya		Total (9)=3+4+5+6+7+8 L+P
		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kepolisian													
2	Kejaksaan													
3	Pengadilan													
4	Bapas													
5	Lapas													
	Jumlah													

Sumber Data: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bapas, Lapas

9.12. DATA TUMBUH KEMBANG ANAK

TABEL 9.12.1.
JUMLAH LEMBAGA DAN PESERTA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	KAB/KOTA	Jml Anak Usia 0-6 Tahun	PAUD NON FORMAL		PAUD FORMAL		Jumlah Anak terlayani (F+NF)	Jumlah Belum Terlayani	Prosentase terlayani (F+NF)	Prosentase terlayani PAUD NF
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah				
			Lembaga	Peserta Didik	Lembaga	Peserta Didik				
1	Kulon Progo									
2	Bantul									
3	Gunungkidul									
4	Sleman									
5	Yogyakarta									
6	D.I. YOGYAKARTA									

Sumber : Dinas Pendidikan

TABEL 9.12.2.
ANGKA MELEK HURUF DAN BUTA HURUF
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO.	KAB/KOTA	ANGKA MELEK HURUF (DATA 2009)			Angka Buta Huruf		
					Usia 15-24 Tahun		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Kulon Progo						
2.	Bantul						
3.	Gunungkidul						
4.	Sleman						
5.	Yogyakarta						
6.	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber : BPS & Dinas Pendidikan

TABEL 9.12.3.
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS	
		SD / MI		SEKOLAH SD		SMP / MTs		SEKOLAH SMP		SMA/SMA/SMK/MA		SEKOLAH SMA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Kulon Progo												
2.	Bantul												
3.	Gunungkidul												
4.	Sleman												
5.	Yogyakarta												
6.	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber : Dinas Pendidikan

9.13. DATA KELANGSUNGAN HIDUP

**TABEL 9.13.1.
JUMLAH KEMATIAN BAYI DAN BALITA
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN**

NO.	KAB/KOTA	BAYI		BALITA	
		JML BAYI	JML BAYI MATI	JML BALITA	JML BALITA MATI
1.	Kulon Progo				
2.	Bantul				
3.	Gunungkidul				
4.	Sleman				
5.	Yogyakarta				
6	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber : Dinas Kesehatan

Ket : Balita = 0-5 tahun, Bayi = 0-1 tahun

**TABEL 9.13.2.
JUMLAH BALITA MENDAPATKAN IMUNISASI
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN**

NO.	KAB/KOTA	Balita Mendapatkan Imunisasi			
		BCG	DPT 3	POLIO 3	CAMPAK
1.	Kulon Progo				
2.	Bantul				
3.	Gunungkidul				
4.	Sleman				
5.	Yogyakarta				
6	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber : Dinas Kesehatan dan Kab.Kota

TABEL 9.13.3.
JUMLAH BAYI DENGAN BERAT BADAN RENDAH
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH BAYI LAHIR		BAYI DENGAN BB RENDAH	
		L	P	L	P
1.	Kulon Progo				
2.	Bantul				
3.	Gunungkidul				
4.	Sleman				
5.	Yogyakarta				
6.	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber : Dinas Kesehatan Kab/Kota/

TABEL 9.13.4.
JUMLAH BAYI MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF SELAMA 6 BULAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH BAYI LAHIR		BAYI MENDAPATKAN ASIS EKSLUSIF 6 BULAN	
		L	P	L	P
1.	Kulon Progo				
2.	Bantul				
3.	Gunungkidul				
4.	Sleman				
5.	Yogyakarta				
6.	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber : Dinas Kesehatan Kab/Kota/

TABEL 9.13.5.
JUMLAH KASUS BALITA KURANG GIZI DAN GIZI BURUK
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO.	KAB/KOTA	JML KASUS BALITA KURANG GIZI		JML KASUS BALITA GIZI BURUK	
		L	P	L	P
1.	Kulon Progo				
2.	Bantul				
3.	Gunungkidul				
4.	Sleman				
5.	Yogyakarta				
6	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber : Dinas Kesehatan Kab/Kota/

TABEL 9.13.6.
JUMLAH ANAK TERINFEKSI HIV/AIDS
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO.	KAB/KOTA	ANAK TERINFEKSI HIV		ANAK MENDERITA AIDS	
		L	P	L	P
1.	Kulon Progo				
2.	Bantul				
3.	Gunungkidul				
4.	Sleman				
5.	Yogyakarta				
6	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber : Dinas Kesehatan Kab/Kota/

**TABEL 9.13.7.
JUMLAH ANAK KORBAN NAPZA
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN**

NO.	KAB/KOTA	ANAK TERINFEKSI HIV		
		L	P	L+P
1.	Kulon Progo			
2.	Bantul			
3.	Gunungkidul			
4.	Sleman			
5.	Yogyakarta			
6.	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber : Dinas Kesehatan Kab/Kota/

9.13.8. Perkawinan Usia Anak

**TABEL 9.13.8.1.
JUMLAH PERNIKAHAN
MENURUT USIA, JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN**

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH PERNIKAHAN			
		<16 Tahun	<19 Tahun	17-21 Tahun	19-21 Tahun
		P	L	P	L
1.	Kulon Progo				
2.	Bantul				
3.	Gunungkidul				
4.	Sleman				
5.	Yogyakarta				
6.	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber : Kementerian Agama

TABEL 9.13.8.2.
PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN USIA 10 TAHUN KE ATAS
MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

NO.	KAB/KOTA	USIA PERKAWINAN PERTAMA			
		<16 Tahun	17-18 Tahun	19-24 Tahun	25 Tahun ke atas
		P	L	P	L
1.	Kulon Progo				
2.	Bantul				
3.	Gunungkidul				
4.	Sleman				
5.	Yogyakarta				
6.	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber : BPS

X. DATA KELEMBAGAAN

10.1. KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Kesehatan:

TABEL 10.1.1

JUMLAH POKJATAP GSI, SATGAS GSI, RUMAHSAKIT SAYANG IBU DAN BAYI DAN KELOMPOK SUAMI SIAP, ANTAR, JAGA (SUAMI SIAGA), DAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

No	KAB/KOTA	Pokjata p GSI Kab/K ota	Satgas GSI Tk. Kec	Satgas GSI Tk. Desa/K el	RSSI- B	Kelompo k Suami Siaga	Kader BKB
1	Kulon Progo						
2	Bantul						
3	Gunungkidul						
4	Sleman						
5	Yogyakarta						
	D.I. YOGYAKARTA						

Sumber data: Badan PP, Dinkes

B. Pendidikan

TABEL 10.1.2.

JUMLAH POKJATAP PENURUNAN BUTA AKSARA PEREMPUAN (PBAP), DAN GUGUS TUGAS PBAP MENURUT KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

No	Kabupaten/Kota	PBAP	Gugus Tugas PBAP	Ket
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data; Dispora, Dinas Pendidikan

C. Ekonomi:

Desa Prima; P2WKSS, Organisasi UMKM, Koperasi, Organisasi Perempuan Pengusaha, Lembaga Keuangan Mikro, Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Koperasi Perempuan, Kelompok Tani/Nelayan Perempuan

TABEL 10.1.3.
JUMLAH DESA “PRIMA” (PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI)
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	Kulon Progo	1..... 2.....		
2	Bantul	1..... 2.....		
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : BPPM DIY

TABEL 10.1.4.
PROGRAM P2WKSS, JUMLAH UMKM, KOPERASI, ORGANISASI PEREMPUAN
PENGUSAHA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH PEREMPUAN, BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM), KOPERASI
PEREMPUAN, DAN KELOMPOK TANI/NELAYAN PEREMPUAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	P2WKSS	UMKM	KOPERASI	ORGANISASI PEREMPUAN PENGUSAHA	LEMBAGA KEAUNAGAN MIKRO	KELOMPOK USAHA MKM PEREMPUAN	KELOMPOK TANI PEREMPUAN	KELOMPOK NELAYAN PEREMPUAN
1	Kulon Progo								
2	Bantul								
3	Gunungkidul								
4	Sleman								
5	Yogyakarta								
	D.I. YOGYAKARTA								

Sumber data : BPPM DIY

D. PUG:

Pokja PUG, Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), Forum Perlindungan Perempuan, *Focal Point Gender*

TABEL 10.1.5.
JUMLAH POKJA PUG, FORUM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN (PKHP), FORUM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (PPEP), FORUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, FOCAL POINT GENDER MENURUT KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

No	Kab/Kota	Pokja PUG	Forum PKHP	Forum PPEP	Forum Perlindungan Perempuan	<i>Focal Point Gender</i>
1	Kulon Progo					
2	Bantul					
3	Gunungkidul					
4	Sleman					
5	Yogyakarta					
	D.I. YOGYAKARTA					

Sumber data : BPPM DIY

E. Perlindungan Perempuan dan Anak:

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A): yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan, dan penanganan korban

TABEL 10.1.6.
DAFTAR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

No		Nama P2TP2A	Alamat	Dasar Hukum pembentukan
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : BPPM DIY

F. Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan

TABEL 10.1.7.
HASIL KAJIAN ATAU HASIL PENELITIAN TENTANG PUG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Hasil Kajian
1	Kulon Progo	1..... 2..... ..
2	Bantul	1..... 2..... ..
3	Gunungkidul	
4	Sleman	
5	Yogyakarta	
	D.I. YOGYAKARTA	

Sumber data : BPPM DIY

TABEL 10.1.8.
JUMLAH DAN JENIS PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER MENURUT KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1	Kulon Progo	1..... 2.....	
2	Bantul	1..... 2.....	
3	Gunungkidul	1..... 2.....	
4	Sleman	1..... 2.....	
5	Yogyakarta	1..... 2.....	
6	D.I. YOGYAKARTA	1..... 2.....	

Sumber data : BPPM DIY

TABEL 10.1.9.
JUMLAH DAN JENIS KEBIJAKAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kebijakan	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1	Kulon Progo	1.....	
		2.....	
2	Bantul	1.....	
		2.....	
3	Gunungkidul	1.....	
		2.....	
4	Sleman	1.....	
		2.....	
5	Yogyakarta	1.....	
		2.....	
6	D.I. YOGYAKARTA	1.....	
		2.....	

Sumber data : BPPM DIY

TABEL 10.1.10.
JUMLAH DAN JENIS PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1	Kulon Progo	1.....	
		2.....	
2	Bantul	1.....	
		2.....	
3	Gunungkidul	1.....	
		2.....	
4	Sleman	1.....	
		2.....	
5	Yogyakarta	1.....	
		2.....	
6	D.I. YOGYAKARTA	1.....	
		2.....	

Sumber data : BPPM DIY

TABEL 10.1.11.
JUMLAH DAN JENIS KEBIJAKAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kebijakan	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1	Kulon Progo	1.....	
		2.....	
2	Bantul	1.....	
		2.....	
3	Gunungkidul	1.....	
		2.....	
4	Sleman	1.....	
		2.....	
5	Yogyakarta	1.....	
		2.....	
6	D.I. YOGYAKARTA	1.....	
		2.....	

Sumber data : BPPM DIY

TABEL 10.1.12.
LEMBAGA YANG BERGERAK DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Kab/Kota	RP TC	LB H	PK T	PP T	UPP A	Trauma Center	Women Crisis Center	She lter	Rum ah Singg ah	RP SA	Panti Asuh an Anak	L P A
1	Kulon Progo												
2	Bantul												
3	Gunungkidul												
4	Sleman												
5	Yogyakarta												
	D.I. YOGYAKARTA												

Sumber data : BPPM DIY

TABEL 10.1.13.
LEMBAGA /BADAN/ UNIT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No.	Kab/Kota	Nomenklatur kelembagaan	Dasar Hukum/Tahun Pembentukan	Nama Pimpinan/ Eselonisasi	Alamat Kantor (Telp. Fax, Email)
1	Kulon Progo				
2	Bantul				
3	Gunungkidul				
4	Sleman				
5	Yogyakarta				
	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber : Unit PP, PA & KB

TABEL 10.1.14.
DAFTAR KELEMBAGAAN PUSAT STUDI WANITA/GENDER
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No.	Kab/Kota	Nama Universitas/ Perguruan Tinggi	Dasar Hukum/Tahun Pembentukan	Nama Pimpinan/ Ketua	Alamat Kantor (Telp. Fax, Email)
1	Kulon Progo				
2	Bantul				
3	Gunungkidul				
4	Sleman				
5	Yogyakarta				
	D.I. YOGYAKARTA				

Sumber data : BPPM DIY

TABEL 10.1.15.
DAFTAR LEMBAGA MASYARAKAT/ORGANISASI MASYARAKAT/LBH
YANG PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No.	Kab/Kota	Nama Kelembagaan/ LSM/LBH	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat Kantor (Telp. Fax, Email)
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data : BPPM DIY

10.2. KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

**TABEL 10.2.1.
JUMLAH DAN JENIS PERATURAN DAERAH YANG PEDULI ANAK
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1	Kulon Progo	1.....	
		2.....	
2	Bantul	1.....	
		2.....	
3	Gunungkidul	1.....	
		2.....	
4	Sleman	1.....	
		2.....	
5	Yogyakarta	1.....	
		2.....	
6	D.I. YOGYAKARTA	1.....	
		2.....	

Sumber data : BPPM DIY

**TABEL 10.2.2
JUMLAH DAN JENIS KEBIJAKAN DAERAH YANG PEDULI ANAK
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kebijakan	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1	Kulon Progo	1.....	
		2.....	
2	Bantul	1.....	
		2.....	
3	Gunungkidul	1.....	
		2.....	
4	Sleman	1.....	
		2.....	
5	Yogyakarta	1.....	
		2.....	
6	D.I. YOGYAKARTA	1.....	
		2.....	

Sumber data : BPPM DIY

10.3. Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak

TABEL 10.3.1.
JUMLAH KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN KELANGSUNGAN HIDUP ANAK
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Prov/Kab/Kota	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Posyandu	Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Panti Asuhan Anak Yatim Piatu
1	Kulon Progo					
2	Bantul					
3	Gunungkidul					
4	Sleman					
5	Yogyakarta					
	D.I. YOGYAKARTA					

Sumber data: BKKBN, Dinkes, Diknas, Dinsos.

10.4. Kelembagaan Partisipasi Anak

TABEL 10.4.1.
JUMLAH KELEMBAGAAN PARTISIPASI ANAK
MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Kab/Kota	Organisasi/Forum Anak	Telepon Sahabat Anak 129	Lainnya
1	Kulon Progo			
2	Bantul			
3	Gunungkidul			
4	Sleman			
5	Yogyakarta			
	D.I. YOGYAKARTA			

Sumber data: Biro/Badan PP& PA, Diknas.

10.5. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak

TABEL 10.5.1.
JUMLAH KELEMBAGAAN UNTUK MENDORONG LINGKUNGAN YANG KONDUSIF
BAGI ANAK MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN

No	Kab/Kota	Gugus Tugas Trafiking	Gugus Tugas KLA	LPA	KPAID	Lain Lain
1	Kulon Progo					
2	Bantul					
3	Gunungkidul					
4	Sleman					
5	Yogyakarta					
	D.I. YOGYAKARTA					

Sumber data : BPPM DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001